

SOSIAL EKONOMI PETANI TAMBAK TUMPANGSARI DI KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL, BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
(BKPH) CIKIONG, KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)
PURWAKARTA, PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT,
RESORT POLISI HUTAN (RPH) CIBUAYA
Suatu studi Diagnosis

Oleh :

Hikmat Rusdi*)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan mangrove merupakan spesifik hutan pantai tropik, mempunyai peranan penting yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia, seperti : sebagai tempat kegiatan usaha budidaya perikanan atau sebagai penjaga ekosistem perairan pantai (Harjosentono, 1978 ; Hamilton dan Snedaker, 1984).

Secara umum permasalahan yang terjadi hampir di seluruh kawasan hutan mangrove di Indonesia adalah pengeksploitasian hutan mangrove secara besar-besaran tanpa memperhatikan konsep konservasi, sehingga cenderung ke arah pengrusakan. Untuk mencegah kerusakan hutan baik hutan mangrove maupun jenis hutan lainnya, Pemerintah khususnya Perum Perhutani telah menciptakan dan melaksanakan suatu program yang dinamakan Perhutanan Sosial. Tujuan dari program ini adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan guna meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sekaligus memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan (Anonimous, 1988).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menggunakan sistem *Agroforestry*, yakni mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama. Istilah *agroforestry* untuk daerah pantai disebut *silvo-fishery* dengan bentuk tambak tumpangsari.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberi gambaran mengenai :
a. pelaksanaan program Perhutanan Sosial di kawasan hutan mangrove RPH Cibuaya, BKPH Cikiong, b. sosial ekonomi petani tambak tumpangsari program Perhutanan Sosial tersebut.

*) Mahasiswa S1 Fakultas Perikanan IPB, di bawah bimbingan Ir. Hasril H. Jasin, M.Sc., Ir. Sutomo Achmad, M.Sc., dan R.Y. Rustam T.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 14 Oktober 1990, berlokasi di wilayah Kehutanan RPH Cibuaya, BKPH Cikiong, Desa Sedari dan Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Metoda Pengambilan Contoh dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan suatu studi diagnostik. Pengertian studi diagnostik dalam penelitian ini adalah usaha mempelajari sebab-sebab timbulnya permasalahan yang ada serta saran pemecahan permasalahan tersebut.

Untuk mendukung hasil diagnosa digunakan studi kasus terhadap sosial ekonomi petani tambak tumpangsari program Perhutanan Sosial di RPH Cibuaya dan kehidupan dua keluarga petani tambak, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan RPH Cibuaya.

Sampel yang diambil sebagai responden adalah anggota kelompok petani tambak tumpangsari yang resmi ditetapkan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pada tahun 1987 dan 1989 sebagai model atau contoh pelaksanaan program Perhutanan Sosial di wilayah RPH Cibuaya dan saat penelitian masih aktif. Untuk data penunjang yakni "kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di dalam atau sekitar hutan" diambil semua desa berdasarkan sebagian wilayahnya termasuk ke dalam kawasan hutan RPH Cibuaya.

Data primer diperoleh dari petani tambak tumpangsari, tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok sosial serta lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara mengutip data yang terdapat di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Metoda Analisis Data

1. Analisis Pendapatan atau Keuntungan Usaha

$$n = TR - TC, \text{ dimana } \begin{array}{l} n = \text{Keuntungan Usaha} \\ TR = \text{Total Penerimaan} \\ TC = \text{Total biaya.} \end{array}$$

$$2. \text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{nilai baru sekarang} - \text{taksiran nilai sisa}}{\text{umur ekonomis}}$$

3. Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya

$$R/C = \frac{TR}{TC} = \frac{\text{Total Penerimaan}}{\text{Total Biaya}}$$

Hasil dan Pembahasan

Kawasan hutan mangrove BKPH Cikiong terletak pada batas utara Kabupaten Karawang, terbentang kurang lebih sepanjang 31,8 km di pantai Utara Laut Jawa, dengan lebar dari pantai berkisar antara 100 m sampai dengan 6 km. Secara administrasi pemerintahan lebih kurang 5.075 ha dari kawasan hutan ini terletak di wilayah Kecamatan Batujaya, sedangkan lebih kurang 2.748,25 ha terletak di Kecamatan Pedes, sehingga luas keseluruhan hutan tersebut adalah 7.823,25 ha.

Penunjukannya sebagai wilayah kehutanan didasarkan atas surat keputusan Directeur Van Landbouw Nijvenheid en Handel tanggal 30 Juli 1930 No. 7137/B sub d. Tata batasnya disyahkan seluas 9.373,8 ha pada tanggal 15 Agustus 1934. Tahun 1961, berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian No. 112/KMP 61, seluas 1.550,55 ha lahan hutan mangrove BKPH Cikiong dikeluarkan, dalam upaya mencegah meluasnya pengrusakan hutan oleh masyarakat.

Kawasan hutan mangrove BKPH Cikiong secara umum dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Permukaan tanahnya dapat dikatakan rata, dengan tekstur tanahnya adalah berupa tanah liat (lempung) dan campuran tanah liat dengan pasir halus, sedangkan iklimnya termasuk tipe D4.

Sampai dengan tahun 1989 kondisi lahan hutan mangrove BKPH Cikiong sangat memperhatikan, karena lebih kurang 97,6 % dari luas lahan keseluruhan telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan usaha tambak tumpangsari, persawahan, pemukiman dan sisanya 2,4 % baru merupakan daerah hutan murni. Informasi yang diperoleh dari Asper/KKBKPH Cikiong, pemanfaatan lahan hutan BKPH Cikiong oleh masyarakat telah berlangsung sejak 30 - 40 tahun yang lalu dan pada saat ini diperkirakan sebanyak 2.500 orang atau rata-rata tiga hektar per orang yang mata pencahariannya tergantung dari kawasan hutan tersebut.

Dilain hal, tingkat pertumbuhan tanaman mangrove tidak merata: hanya lebih kurang 30 % dari luas hutan keseluruhan yang pertumbuhannya baik dan 20 % pertumbuhannya sedang, selebihnya dapat dikatakan pertumbuhan tanamannya kurang. Penyebab lain pengrusakan tanaman hutan mangrove BKPH Cikiong selain disebabkan oleh masyarakat, adalah iklim dan hama serta adanya daerah yang tidak dapat ditanami. Faktor iklim penyebab kerusakan hutan terdiri dari banjir dan kekeringan, sedangkan hama adalah ulat, laba-laba dan tikus. Luas lahan BKPH Cikiong yang tidak dapat ditanami adalah 740 ha. Untuk mengatasi pengrusakan hutan Perum Perhutani BKPH Cikiong telah melakukan, akibat iklim; (a) penyulaman, (b) pelebaran dan pendalaman saluran. Hama ulat; pemberantasan masal dengan racun sistenik (Demacron), hama laba-laba; pembersihan daun dari sarang laba-laba dan penyulaman, sedangkan hama tikus dan lahan yang sulit ditanami cara mengatasinya sedang dipelajari.

Pelaksanaan program Perhutanan Sosial di kawasan hutan mangrove BKPH Cikiong dimulai tahun 1987. Pelaksanaannya pada saat itu terbatas pada lokasi yang ditetapkan sebagai daerah *pilot project*, yakni petak 43 RPH Cibuaya, seluas 25 ha. Dalam perkembangannya selain memperluas daerah pelaksanaan program juga telah berhasil mengumpulkan petani tambak ke dalam suatu wadah yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) serta mendirikan Koperasi.

Sasaran utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Perhutanan Sosial di BKPH Cikiong adalah kembalinya kondisi hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta meningkatnya sosial ekonomi masyarakat atau petani tambak melalui tambak tumpang-sari.

Untuk tercapainya tujuan tersebut sedang dilakukan pendekatan (a) Mengorganisasikan masyarakat atau petani tambak kedalam suatu wadah yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH), (b) mencari pola tambak tumpang-sari yang minimum dapat mempertahankan pendapatan masyarakat sehubungan dengan pertumbuhan tanaman hutan, (c) penegakan hukum dan pembinaan petugas serta meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya.

Jenis-jenis matapencaharian yang tersedia dapat dibagi kedalam dua kelompok, yakni :

1. Kelompok yang tergantung dari hasil tambak;
 - petani tambak,
 - bujang,
 - buruh musiman,
 - pedagang ikan atau depot ikan.
2. Kelompok yang tidak tergantung dari hasil tambak;
 - pencari ikan,
 - pencari kepiting,
 - depot kepiting.

Pengaruh paling besar terhadap keberhasilan tanaman hutan dari kelompok diatas adalah petani tambak dan bujang. Pendapatan petani tambak dari hasil analisis, diketahui :

1. Pendapatan petani tambak yang menjadi anggota *pilot project* dengan kondisi lahan telah tertutupi oleh tanaman mangrove per tahunnya adalah sebesar Rp 826.660,-
2. Pendapatan petani tambak yang menjadi anggota *pilot project* dengan kondisi lahan belum tertutupi oleh tanaman mangrove per tahunnya adalah berkisar antara Rp 1.782.350,- sampai dengan Rp 7.201.940,-
3. Pendapatan petani tambak yang menjadi Model Percontohan Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Hutan Payau (MP3SHP) adalah sebesar Rp 2.830.050,-

Dari tiga variasi pendapatan diatas dibandingkan dengan kriteria garis kemiskinan Sajogyo tahun 1977, petani tambak BKPH Cikiong tidak termasuk kedalam kategori miskin. Tetapi jika diperhatikan motivasi masyarakat atau petani tambak dari hasil pengelolaan tambak tumpangsari yakni hidup yang lebih layak maka hasil ini belum mencukupi terutama untuk butir 1 sehingga kecenderungan untuk merusak hutan timbul kembali.

Pendapatan bujang dapat dibedakan berdasarkan :

1. Sistem Gaji.
2. Sistem Bagi Hasil.

Kelompok pencari ikan dan kelompok pencari kepiting adalah kelompok yang pendapatannya paling rendah, yakni antara Rp 1.500 sampai dengan Rp 2.000 per hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendapatan petani tambak sangat erat hubungannya dengan kondisi tambak dan jenis ikan yang ditanam
2. Pendapatan petani tambak berkurang dengan tumbuhnya tanaman mangrove.

Saran

Untuk keberhasilan program Perhutanan Sosial maka diperlukan penelitian yang lebih terinci mengenai :

1. Prosentase luas tambak yang diperkenankan.
2. Jenis-jenis ikan yang dapat meningkatkan pendapatan petani tambak atau minimum dapat mempertahankan pendapatan yang telah ada sehubungan dengan pertumbuhan tanaman mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 1988. Pedoman Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).
- Hamilton, L.S. dan S.C. Snedaker. 1984. Handbook for Mangrove Area Management. Untited Nation Environment Programme and East-West Center, Environment and Policy Institute. Honolulu, USA.
- Hardjosentono, H.P. 1978. Hutan Mangrove di Indonesia dan Peranannya dalam Pelestarian Sumberdaya Alam. Prosiding Seminar Ekosistem Hutan Mangrove, Jakarta, 27 Februari - 1 Maret 1978. LIPI, Jakarta.